

ANALISA DATA CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP LPPD

A. Gambaran Umum Demografi

A.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk DIY pada tahun 2014 berdasarkan data kependudukan DIY Semester I tahun 2014 adalah sebanyak 3.551.679 orang dengan komposisi jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.778.726 orang dan perempuan sebanyak 1.772.953 orang. *Sex ratio* penduduk DIY sebesar 100,33.

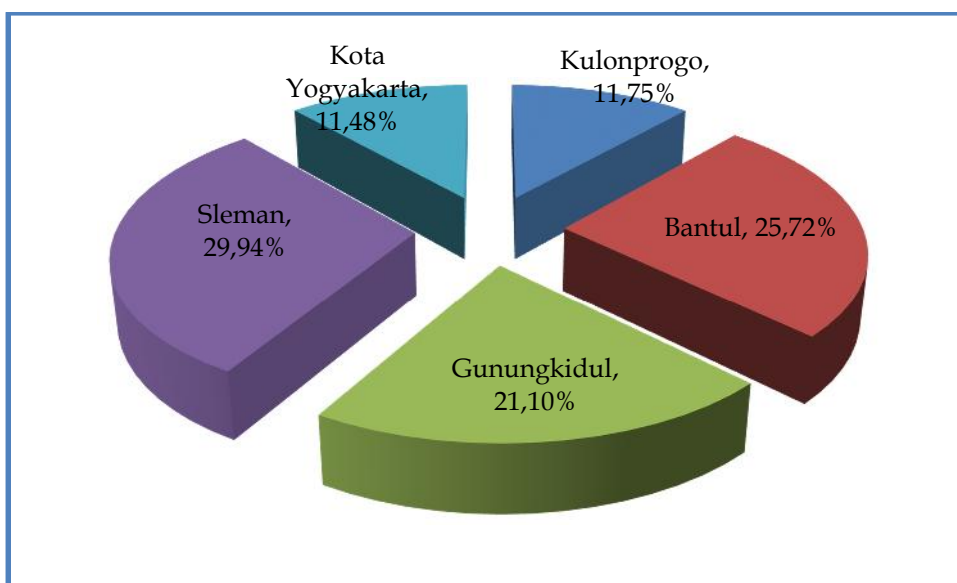
Tabel 1 Jumlah Penduduk DIY Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kabupaten/Kota
Tahun 2014

NO	KABUPATEN/ KOTA	LAKI-LAKI (L)		PEREMPUAN (P)		L+P
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Kulonprogo	206.494	49,46	210.979	50,54	417.473
2	Bantul	458.914	50,24	454.493	49,76	913.407
3	Gunungkidul	375.168	50,06	374.279	49,94	749.447
4	Sleman	538.704	50,66	524.744	49,34	1.063.448
5	Kota Yogyakarta	199.446	48,90	208.458	51,10	407.904
Total		1.778.726	50,08	1.772.953	49,92	3.551.679

Sumber: Data Kependudukan DIY Semester II Tahun 2014, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY (diolah kembali)

Persebaran penduduk DIY menurut Kabupaten/Kota tahun 2014 terbanyak berada di Kabupaten Sleman yaitu sebanyak 1.063.448 orang (29,94%) diikuti oleh Kabupaten Bantul sebanyak 913.407 orang (25,72%), Kabupaten Gunungkidul sebanyak 749.447 orang (21,10%), Kabupaten Kulonprogo sebanyak 417.473 orang

(11,75%) dan Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk tersedikit sebanyak 407.904 orang (11,48%).



Gambar 1 Persebaran Jumlah Penduduk DIY Menurut Kabupaten/Kota (%), tahun 2014
Diolah dari Data Kependudukan DIY Semester II Tahun 2014, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Kondisi kepadatan penduduk di DIY pada tahun 2014 mencapai 1.111,83 jiwa/Km². Daerah terpadat adalah Kota Yogyakarta yaitu 12.542,06 jiwa/Km², sedangkan kepadatan terendah adalah Kabupaten Gunungkidul yaitu 504,36 jiwa/Km². Secara umum, kepadatan penduduk berada pada wilayah yang relatif maju yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

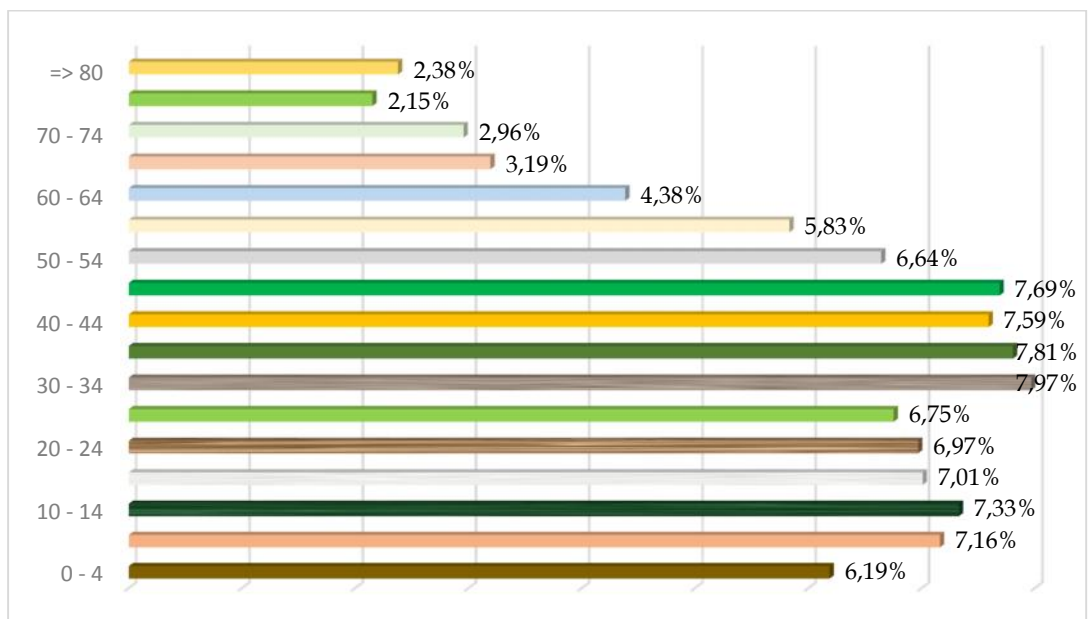
Tabel 2 Kepadatan Penduduk di DIY Per Kabupaten/Kota Tahun 2014

NO	KABUPATEN / KOTA	LUAS WILAYAH		JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK per-km ²
		Km ²	%		
1	Kulonprogo	586,28	18,40	409.568	712,07
2	Bantul	506,85	15,91	912.937	1.802,12
3	Gunungkidul	1.485,36	46,62	749.155	504,56
4	Sleman	574,82	18,04	1.062.801	1.850,05

5	Kota Yogyakarta	32,50	1,02	407.617	12.550,89
*	Total	3.185,81	100	3.542.078	1.114,84

Diolah dari Data Kependudukan DIY Semester II Tahun 2014, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Pada kelompok umur jumlah penduduk DIY terbanyak berada pada usia 30 sampai 34 tahun yakni mencapai 282.962 atau sebesar 7,97% dari jumlah penduduk DIY, kemudian diikuti oleh kelompok umur 35-39 tahun (7,81%) dan kelompok umur 45-49 tahun (7,69%).

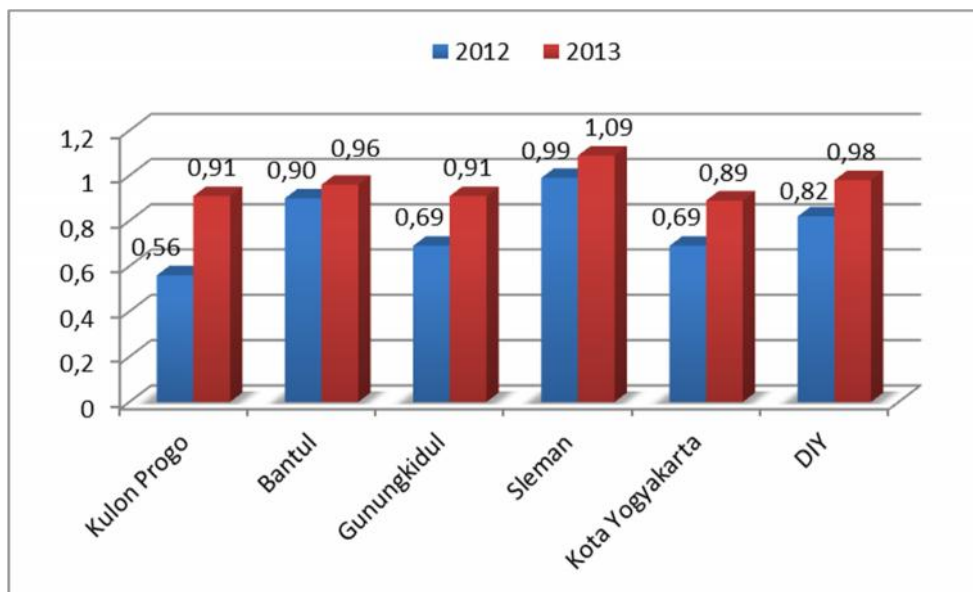


Gambar 2 Persentase Penduduk DIY Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2014

Diolah dari Data Kependudukan DIY Semester II Tahun 2014, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Sedangkan laju pertumbuhan penduduk DIY tahun 2013 sebesar 0,98% mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 0,82%. Dua wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi pada tahun 2013 yaitu Kabupaten Sleman (1,09%) dan Kabupaten Bantul (0,96%). Tiga daerah lainnya memiliki laju pertumbuhan penduduk yang relatif rendah yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulonprogo. Namun, laju pertumbuhan penduduk kota dan dua kabupaten tersebut pada tahun 2013 mengalami kenaikan, yaitu untuk Kota Yogyakarta sebesar 0,69% pada tahun 2012 naik menjadi 0,89% pada tahun 2013, Kabupaten Kulonprogo sebesar 0,56% pada tahun 2012 naik menjadi

0,91% pada tahun 2013, dan Kabupaten Gunungkidul sebesar 0,69% pada tahun 2012 naik menjadi 0,91% pada tahun 2013.



Gambar 3 Laju Pertumbuhan Penduduk DIY Menurut Kabupaten/Kota (%), 2012-2013

Sumber: DIY Dalam Angka 2014, BPS DIY

A. 2. Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja DIY menurut data BPS pada tahun 2014 sebanyak 2.023.461 orang atau sebesar 71,05% dari total penduduk DIY berumur 15 tahun keatas. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2014 ini mengalami kenaikan sebesar 74.218 dibandingkan tahun 2013 yang sebanyak 1.949.243 orang. Dari total angkatan kerja di DIY tahun 2014, sebanyak 96,67% merupakan penduduk yang bekerja, sedangkan 3,33% merupakan pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diperoleh dengan membandingkan antara jumlah pengangguran dengan angkatan kerja.

Selama periode 2011-2014 komposisi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utamanya tidak banyak mengalami perubahan. Empat sektor yang relatif banyak menyerap tenaga kerja di DIY adalah sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa-jasa dan sektor industri pengolahan.

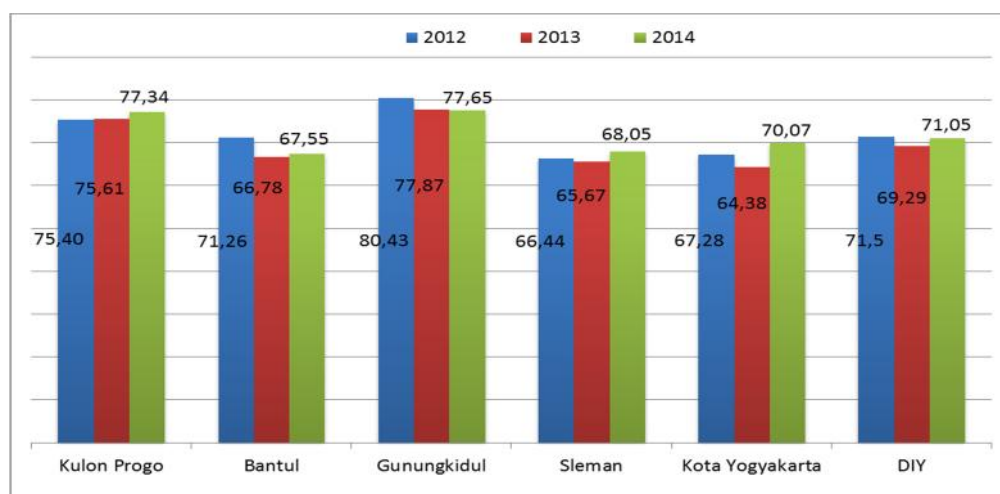
Pada periode Agustus 2014, penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 25,41%, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebanyak 25,86%, sektor jasa-jasa sebanyak 19,14% dan sektor industri pengolahan sebanyak 13,97%. Sedangkan sektor dengan jumlah tenaga kerja yang relatif rendah yaitu sektor konstruksi (7,48%), sektor pengangkutan dan komunikasi (3,52%), sektor keuangan, real estate dan jasa

perusahaan (3,75%) dan sektor lainnya (pertambangan, penggalian, listrik, gas dan air) sebanyak 0,86%.

Menurut status pekerjaan utamanya, penduduk usia 15 tahun keatas sebagian bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Data BPS DIY, periode Agustus tahun 2014 menunjukkan jumlah penduduk bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai sebanyak 43,22% sementara jumlah penduduk bekerja sebagai buruh tidak tetap/buruh tidak dibayarsebanyak 16,59%, pekerja keluarga/tidak dibayar sebanyak 14,75%, penduduk berusaha sendiri sebanyak 13,92%, pekerja bebas sebanyak 7,62%, dan penduduk yang berusaha dibantu buruh tetap sebanyak 3,90%.

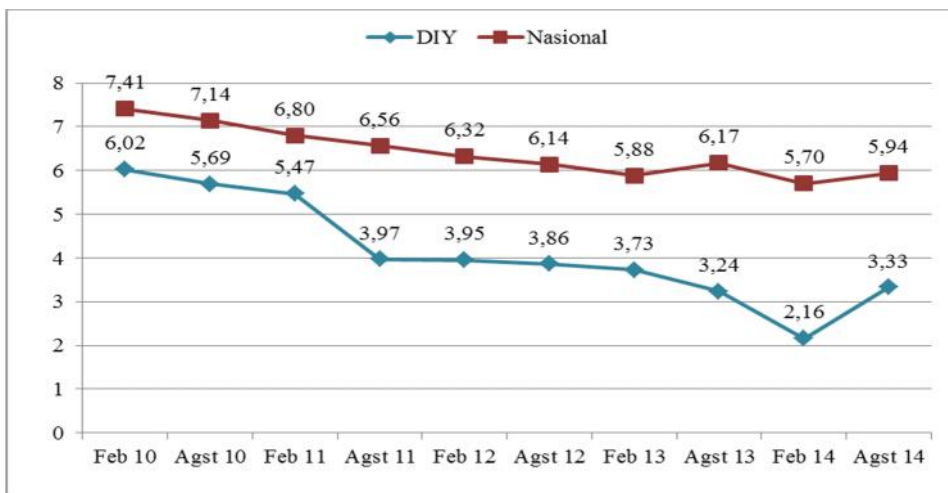
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara penduduk angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Hasil Sakernas Agustus 2014 menunjukan bahwa TPAK di DIY adalah sebesar 71,05%, angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan keadaan Agustus 2013 yang besarnya 69,29% atau selama kurun waktu satu tahun naik 1,76 poin.

Selama periode 2012-2014, TPAK Kabupaten/Kota mengalami perkembangan yang fluktuatif. Hampir semua kabupaten/kota di DIY mengalami kenaikan TPAK pada tahun 2014 bila dibanding tahun 2013. Pada periode Agustus 2014, kabupaten yang memiliki TPAK tertinggi adalah Kabupaten Gunungkidul dan TPAK terendah di Kabupaten Bantul. Meskipun memiliki TPAK tertinggi di DIY tetapi dilihat dari perkembangan selama 2012-2014 TPAK Kabupaten Gunungkidul cenderung mengalami penurunan.



Gambar 4 TPAK Kabupaten/Kota di DIY, Agustus 2012-Agustus 2014
Sumber: BPS DIY

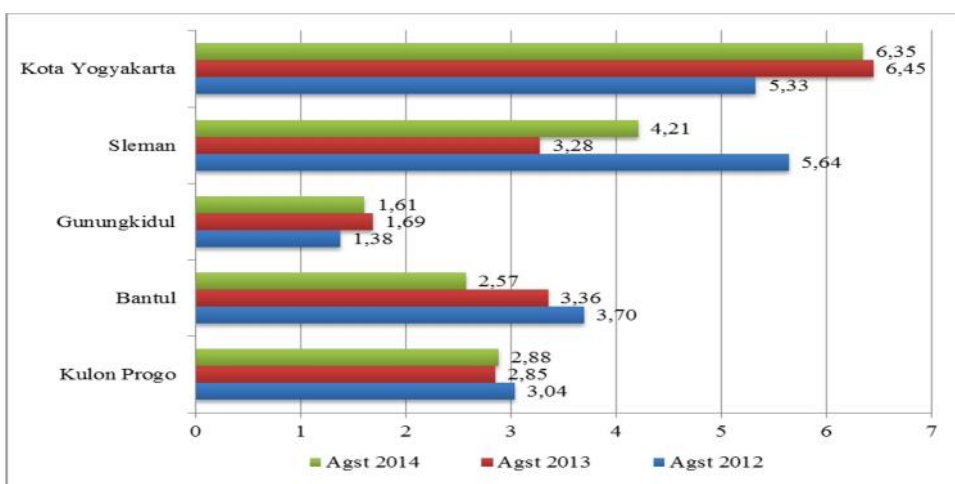
Selama periode 2010-2014 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DIY cenderung menurun. TPT DIY pada Agustus 2010 tercatat sebesar 5,69% turun menjadi 3,33% pada Agustus 2014. TPT DIY tergolong rendah karena di bawah rata-rata nasional.



Gambar 5 Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY dan di Tingkat Nasional, Februari 2010-Agustus 2014 (%)

Sumber: BPS DIY

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut kabupaten/kota di DIY selama periode Agustus 2012-Agustus 2014 mengalami fluktuasi. Selama periode tersebut, TPT di Kabupaten Bantul mengalami penurunan sementara kabupaten/kota yang lain bervariasi. Pada tahun 2014 TPT tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta, yaitu sebesar 6,35% dan terendah di kabupaten Gunungkidul yaitu 1,61%.

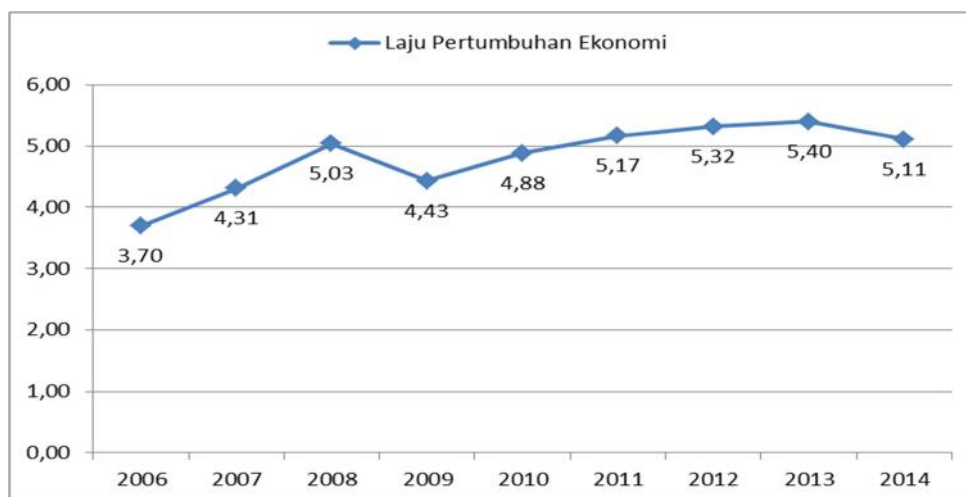


Gambar 6 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di DIY, Agustus 2012-Agustus 2014 (%)

Sumber: BRS 5 November 2014, BPS DIY

B. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi DIY selama 2009-2013 cenderung mengalami kenaikan dari sebesar 4,43% pada tahun 2009 meningkat menjadi sebesar 5,40% pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,29 poin menjadi sebesar 5,11%.



Gambar 7 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DIY, 2006-2014 (%)

Sumber: BPS DIY

Tingginya laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai selama tahun 2013 didorong oleh pertumbuhan positif di semua sektor perekonomian. Pertumbuhan yang tertinggi terjadi di sektor industri pengolahan, yang mampu tumbuh sebesar 7,81%, setelah pada tahun sebelumnya mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) sebesar 2,28%. Golongan industri makanan, minuman, dan tembakau; industri tekstil, produk tekstil, alas kaki dan kulit; dan industri furnitur memberi kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan di sektor industri pengolahan.

Produksi industri pengolahan tersebut sangat dipengaruhi oleh permintaan domestik melalui kegiatan pariwisata maupun permintaan ekspor. Pertumbuhan tertinggi berikutnya dihasilkan oleh sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 6,54% dan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 6,30%. Sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa yang cukup dominan dalam struktur perekonomian DIY juga mampu tumbuh meyakinkan masing-masing sebesar 6,20% dan 5,57%. Sektor pertanian menjadi lapangan usaha yang memiliki laju pertumbuhan terendah, meskipun masih tumbuh positif sebesar 0,63% dan mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Besarnya andil atau sumbangan masing-masing sektor dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi di DIY didominasi oleh sektor-sektor yang memiliki nilai nominal

besar, walaupun pertumbuhan sektor yang bersangkutan relatif kecil. Sektor yang memberi sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2013 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan andil 1,31%. Besarnya andil yang diberikan oleh sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa terhadap pertumbuhan ekonomi DIY masing-masing sebesar 0,98%, meskipun dari sisi pertumbuhan yang dihasilkan sektor industri pengolahan menjadi yang tertinggi. Andil yang terendah terhadap pertumbuhan ekonomi DIY diberikan oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,03%.

Lebih lanjut, sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2014 adalah sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 8,73% diikuti oleh sektor Jasa-Jasa sebesar 7,62%, sektor Perdagangan, Hotel-Restoran sebesar 6,29%, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar 5,77% dan sektor Bangunan sebesar 5,74% sedangkan sektor yang mengalami kontraksi adalah sektor pertanian sebesar -1,37%.

Tabel 3 Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha, 2012-2014 (%)

Sektor	Pertumbuhan 2012	Pertumbuhan 2013	Pertumbuhan 2014
Pertanian	4,19	0,63	-1,37
Pertambangan dan Penggalian	1,98	4,92	2,24
Industri Pengolahan	-2,28	7,81	4,09
Listrik, Gas dan Air Bersih	7,11	6,54	5,77
Bangunan	5,97	6,07	5,74
Perdagangan, Hotel-Restoran	6,69	6,20	6,29
Pengangkutan dan Komunikasi	6,21	6,30	5,04
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	9,95	6,23	8,73
Jasa-jasa	7,09	5,57	7,62
DIY	5,32	5,40	5,11

Sumber: BPS DIY

Nilai PDRB di DIY tahun 2014 atas dasar berlaku mencapai 70,863 trilyun rupiah atas sebesar 25,824 trilyun rupiah atas dasar harga konstan. Nilai tersebut meningkat sebesar 7,168 trilyun rupiah (atas harga berlaku) atau sebesar 1,254 trilyun rupiah (atas harga konstan) dibandingkan tahun sebelumnya. Empat sektor dengan kontribusi terbesar terhadap nilai PDRB DIY tahun 2014 adalah sektor perdagangan, jasa, pertanian dan sektor industri pengolahan.

Tabel 4 Nilai PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha, 2013-2014 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha	2013		2014	
	ADH Berlaku	ADH Konstan	ADH Berlaku	ADH Konstan
Pertanian	8.866,69	3.732,46	9.503,83	3.681,18
Pertambangan dan Penggalian	416,53	167,67	452,40	171,42
Industri Pengolahan	8.771,19	3.142,84	9.662,21	3.271,29
Listrik, Gas dan Air Bersih	796,70	229,64	958,13	242,90
Bangunan	6.908,38	2.459,17	7.578,02	2.600,38
Perdagangan, Hotel-Restoran	13.152,52	5.225,06	14.779,13	5.553,90
Pengangkutan dan Komunikasi	5.399,50	2.744,16	5.981,63	2.882,55
Kuangan, Persewaan & Js Persh.	6.543,15	2.552,44	7.447,28	2.775,21
Jasa-jasa	12.840,03	4.316,21	14.500,80	4.645,25
PDRB DIY	63.694,70	24.569,65	70.863,44	25.824,10

Sumber : BPS DIY

Kontribusi sektor pembentuk PDRB tahun 2014 di DIY tidak mengalami perubahan signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2013. Meskipun kontribusi beberapa sektor mengalami perubahan, namun masih didominasi oleh sektor Perdagangan Hotel dan Restoran, Jasa-jasa, Pertanian dan Industri Pengolahan. Pada tahun 2014 kontribusi sektor Perdagangan Hotel Restoran menempati urutan tertinggi dengan nilai kontribusi sebesar 20,86%, kemudian diikuti oleh sektor Jasa 20,46%, sektor Industri Pengolahan 13,63%, sektor Pertanian 13,41%, sektor bangunan 10,69%, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 10,51%, sektor pengangkutan dan komunikasi 8,44%, sektor listrik, gas dan air bersih 1,35% dan kontribusi paling kecil adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan nilai kontribusi 0,64%.

Tabel 5 Kontribusi Sektor Terhadap PDRB di DIY, 2010-2013

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014
Pertanian	14,50	14,23	14,65	13,92	13,41
Pertambangan dan Penggalian	0,67	0,70	0,67	0,65	0,64
Industri Pengolahan	14,02	14,36	13,34	13,77	13,63
Listrik, Gas dan Air Bersih	1,33	1,31	1,28	1,25	1,35
Bangunan	10,59	10,78	10,85	10,85	10,69
Perdagangan, Hotel-Restoran	19,74	19,79	20,09	20,65	20,86
Pengangkutan dan Komunikasi	9,03	8,83	8,60	8,48	8,44
Keuangan, Persewaan & Js Perush	9,98	9,96	10,30	10,27	10,51
Jasa-jasa	20,07	20,05	20,23	20,16	20,46

Sumber :BPS DIY

Sementara itu, nilai dan laju pertumbuhan PDRB menurut penggunaan tahun 2014 menunjukkan kontribusi terbesar berasal dari konsumsi rumah tangga sebesar 37,216 trilyun rupiah atas dasar harga berlaku atau sebesar 12,525 trilyun rupiah atas dasar harga konstan. Dengan nilai tersebut, kontribusi sektor rumah tangga terhadap PDRB DIY tahun 2014 sebesar 52,52%. Konsumsi pemerintah sebesar 18,927 trilyun rupiah atas dasar harga berlaku atau 5,144 trilyun rupiah atas dasar harga konstan, atau tingkat kontribusinya sebesar 26,71%. Lebih lanjut, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berkontribusi sebesar 31,95% yaitu sebesar 22,642 trilyun rupiah atas dasar harga berlaku atau 6,790 trilyun rupiah atas dasar harga konstan.

Tabel 6 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Penggunaan, 2013-2014

Lapangan Usaha	2013			2014		
	ADH Berlaku (Milyar Rp)	ADH Konstan (Milyar Rp)	Laju Pertum b. (%)	ADH Berlaku (Milyar Rp)	ADH Konstan (Milyar Rp)	Laju Pertu mb. (%)
Konsumsi RT	33.293,53	11.937,09	5,82	37.216,02	12.525,93	4,93
Konsumsi Pemerintah	16.809,33	4.923,54	5,31	18.927,76	5.144,32	4,48
PMTB	19.928,74	6.420,35	5,13	22.642,90	6.790,04	5,76
Lainnya *)	-6.336,91	1.288,67	3,40	-7.923,24	1.363,80	5,83
PDRB	63.694,70	24.569,65	5,41	70.863,44	25.824,10	5,11

Sumber : BPS DIY

*) termasuk ekspor, impor, konsumsi lembaga nirlaba, perubahan inventori dan diskrepani statistik (residual)

Nilai PDRB per kapita di DIY atas dasar harga berlaku pada tahun 2014 mencapai 19,48 juta rupiah atau meningkat 9,96%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2013 yang besarnya 17,72 juta rupiah. Sementara itu, jika dilihat dari harga konstan, PDRB per kapita DIY pada tahun 2014 mencapai 7,1 juta rupiah meningkat sebesar 3,88% dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 6,83 juta rupiah.

Tabel 7 Nilai PDRB Per Kapita DIY, 2010-2014 (Rupiah)

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
2010	13.158.106	6.068.957
2011	14.753.616	6.305.354
2012	16.054.492	6.561.468
2013	17.718.298	6.834.674
2014	19.483.414	7.100.158

Sumber: BPS Provinsi DIY

Laju inflasi di Kota Yogyakarta tahun 2014 sebesar 6,59%. Angka inflasi tahun 2014 ini lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2013 yang besarnya 7,32%. Laju inflasi 2014 berasal dari kelompok pengeluaran Transpor dan Komunikasi 9,36%, perumahan 8,92%, bahan makanan 7,70%, kesehatan 5,49%, sandang 3,61%, Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau 2,95%, dan terendah adalah kelompok pengeluaran Pendidikan Rekreasi dan Olah raga 2,37%.

Tabel 8 Laju Inflasi Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran, Tahun 2012-2014

No	Kelompok Pengeluaran	2012	2013	2014
	Umum	4,31	7,32	6,59
1	Bahan Makanan	8,1	12,31	7,70
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	6,9	8,15	2,95
3	Perumahan	2,99	5,18	8,92
4	Sandang	3,56	0	3,61
5	Kesehatan	1,93	3,08	5,49
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	1,43	3,17	2,37
7	Transpor dan Komunikasi	1,3	10,45	9,36

Sumber: BPS Provinsi DIY

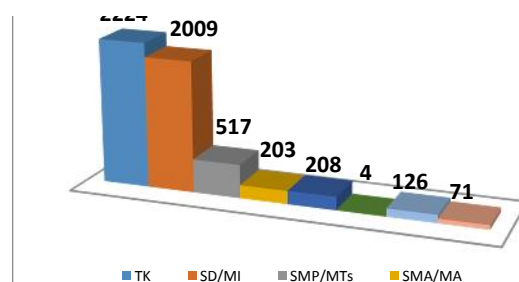
C. Pembangunan Sumber Daya Manusia

C.1. Urusan Pendidikan

Pendidikan luar biasa untuk jenjang SD/MI termasuk inklusi se-DIY sebesar 86,34% pada tahun 2012 dihitung dari jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI sebanyak 4.672 siswa, dengan jumlah penduduk penyandang ketunaan di Usia SD/MI sebanyak 5.411 orang, jenjang SMP/MTs di DIY termasuk inklusi sebesar 76,87%, sedangkan untuk jenjang SMA/MA/SMK di DIY sebesar 50,00 %. Sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 89,77 % di tingkat SD/MI, 79,72 % di tingkat SMPU/MTs sedangkan pada tingkat SMA/MA/SMK 73,54 %. Untuk

Jumlah Institusi Pendidikan di DIY

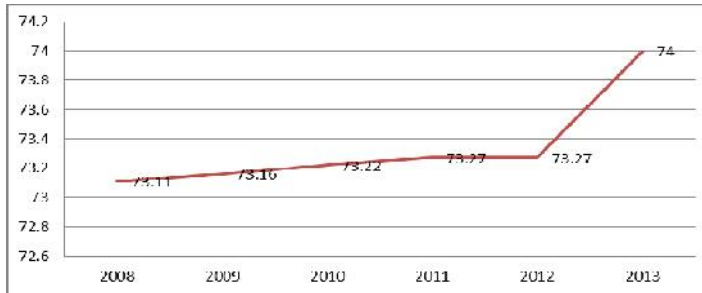
Sumber: Disdikpora DIY



meningkatkan kualitas pendidikan luar biasa diperlukan guru penganjar yang handal. Pembinaan guru jenjang SD/MI pada tahun 2012 sebesar 54,36 persen. Angka ini diperoleh dari jumlah guru jenjang SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi dibandingkan dengan jumlah guru sesuai dengan jenjang SD/MI. Pada tahun 2013 angka ini naik cukup signifikan sebesar 75,53 % dan pada tahun 2014 sebesar 80,90 %. Sedangkan ditingkat SMP/MTs angka menunjukkan peningkatan yang cukup yakni 2012 sebesar 83,97 %, 2013 sebesar 87,24 % dan 2014 sebesar 98,07 %. Ditingkat SMA/MA/SMK angka pembinaan guru pada tahun 2014 menunjukkan 94,03 %, 2013 sebesar 93,19 % dan 2012 90,75 %. Adanya tunjangan sertifikasi guru mempengaruhi signifikan terhadap meningkatkan mutu pendidikan para guru.

C.2. Urusan Kesehatan

Pembangunan kesehatan yang berkesinambungan telah berhasil meningkatkan status kesehatan masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dengan didapatkannya berbagai penghargaan sektor kesehatan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Secara nasional, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar tahun 2010 menempatkan DIY sebagai provinsi dengan pencapaian indikator kesehatan terbaik dalam pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDG's).



Angka Harapan Hidup di DIY tahun 2008-2013

Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan keberhasilan dimana di tahun 2013 targetnya 73,37 tahun dan realisasinya 74 tahun. Sedangkan pada tahun 2014 masih belum memenuhi target

yang ditentukan 74,41 namun terealisasi 73,74. Aspek kesehatan memiliki pengaruh sangat signifikan terhadap capaian angka harapan hidup di DIY, terutama tingkat kesehatan bayi rendah (BBLR) sebagai akibat dari kondisi ibu hamil kurang energi kronik (KEK). Hal ini dipicu karena kurang optimalnya asupan nutrisi yang dipengaruhi tekanan ekonomi, kondisi sosial budaya dan pendidikan. Namun apabila dibandingkan dengan AHH yang diperoleh provinsi lain, capaian DIY sangat tinggi. Pencapaian AHH yang tinggi juga menjadi salah satu penanda penting keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat terutama di sektor kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan angka usia harapan hidup dipengaruhi dari beberapa faktor yang dalam hal ini faktor kesehatan lebih berperan penting selain faktor lain seperti ekonomi, budaya, dan pendidikan. Peran sektor kesehatan mempengaruhi masyarakat dalam menurunkan angka kesakitan, peningkatan gizi masyarakat, dan pelayanan kesehatan yang baik juga akan sangat mempengaruhi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dalam pengukurannya mencakup kualitas bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan penduduk (pendapatan penduduk) menunjukkan trend tahun 2005 sampai dengan 2011, baik di tingkat nasional maupun DIY cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 IPM DIY sebesar 75,23 sedangkan nasional sebesar 71,76. Untuk DIY baik pada tahun 2009 maupun 2010 menduduki posisi keempat nasional. Pada tahun 2010, IPM DIY sebesar 75,77, sedangkan IPM nasional 72,27. IPM DIY tahun 2011 sebesar 76,32, juga lebih tinggi dibandingkan capaian nasional pada tahun yang sama yang besarnya 72,77. Pada Tahun 2012 IPM DIY sebesar 76,75 dan Nasional sebesar 73,29. Sedangkan pada tahun 2013 IPM DIY sebesar 77,37 sedangkan nasional sebesar 73,86.

Tabel 9 IPM Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota di DIY, 2013

Kabupaten / Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Angka Melek Huruf (%)	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan (000 Rp)	IPM	Peringkat IPM
Kulonprogo	75,03	93,13	8,37	635,96	75,95	4
Bantul	71,62	92,81	9,02	656,07	76,01	3
Gunungkidul	71,36	85,22	7,79	634,88	71,64	5
Sleman	75,79	95,11	10,55	656,00	79,97	2
Kota Yogyakarta	73,71	98,43	11,56	658,76	80,51	1
DIY	73,62	92,86	9,33	656,19	77,37	2

Peningkatan IPM di DIY tidak terlepas dari kinerja kesehatan di kabupaten dan kota di DIY. Capaian Kinerja Kesehatan di kabupaten/kota di tunjukkan dengan beberapa indikator. Prosentase cakupan dihitung dari jumlah capaian di 5 kabupaten/kota dibagi jumlah kabupaten/kota. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani menunjukkan angka capaian 2012 95,04 %, tahun 2013 sebesar 94,84 % sedangkan pada tahun 2014 sebesar 93,19 % turun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1, 65%. Sedangkan capaian cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, pada tahun 2014 turun dibandingkan 2 tahun sebelumnya yakni 97, 83 %, capaian tahun 2013 sebesar 99,97 % dan 2012 99,85 %. Penanganan Balita Gizi Buruk telah mendapatkan perawatan. Untuk penanganan penyakit TBC BTA, angka menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC dan BTA (+) sebesar 45,43 %, tahun 2013 naik cukup tinggi yakni 58,80 % dan pada tahun 2014 turun menjadi 58,63 %. Dalam penemuan penanganan penderita DBD dapat tercapai 100 %. Prosentase cakupan layanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin menunjukkan angka lebih dari 100 %, pada tahun 2012 sebesar 120,76%, 128,82% di tahun 2013 dan 2014 menunjukkan penurunan 116,20 %.

C.3. Urusan Perpustakaan.

Salah satu sasaran utama kegiatan pada urusan ini adalah untuk menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan. Pemda DIY melakukan sejumlah promosi perpustakaan yang inovatif dan kreatif dengan memanfaatkan media cetak,

media audio visual serta lomba pemustaka. Tahun 2014, realisasi kenaikan jumlah pengunjung 19,54% dari target 18%, lebih besar daripada persentase tahun 2013 yaitu 14,51%. Pemda DIY juga memberikan bantuan kepada perpustakaan desa untuk terus meningkatkan pelayanan dan koleksinya. Realisasi mencapai 86,76% dari target 70%. Persentase jumlah perpustakaan desa yang mendapat bantuan tersebut meningkat dibandingkan persentase tahun 2013 yaitu 80,37%. Tahun 2014, Badan Perpustakaan dan Arsip DIY memiliki 169.452 judul dengan 387.541 eksemplar. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2013 dengan jumlah koleksi 158.917 judul dengan 245.078 eksemplar.

C.4. Urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Capaian kinerja pada urusan tersebut di 5 kabupaten/kota di DIY menunjukkan bahwa persentase tingkat prevalensi peserta KB Aktif pada tahun 2014 sudah tercapai 70,64 % naik 0,29 % dari tahun 2013. Sedangkan pada tahun 2012 capaian kinerja sebesar 73,59 %. Pasang surut capaian dari tahun ke tahun tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jumlah pasangan usia subur, jumlah peserta KB, maupun jumlah penduduknya.

Meningkatan peserta KB aktif didukung pula oleh petugas lapangan KB/Penyuluh KB di setiap Desa/Kelurahan. Jumlah penyuluh KB di DIY tahun 2012 berjumlah 299 orang , pada tahun 2013 berjumlah 257 orang dan 2014 sebanyak 245 orang jumlah tersebut terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan petugas KB memasuki masa pensiun dan belum tersedia petugas KB/penyuluh KB baru.

C.5. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kesetaraan gender dan perlindungan terhadap hak anak merupakan bagian integral dalam pembangunan DIY. Kesetaraan gender antara lain dapat dilihat dari tingkat partisipasi perempuan di lembaga swasta, partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan keanggotaan perempuan di dalam organisasi politik. Pada tahun 2014, tingkat partisipasi lembaga pemerintah adalah sebesar 4,19% dari keseluruhan jumlah peserja perempuan sebanyak 896.341. Sedangkan pada tahun 2013 sebesar 3,30 % atau 28.523 dari total peserja perempuan sebanyak 863.897. Sementara pada tahun 2012 jumlah peserja perempuan sebanyak 826.897 dengan pekerja perempuan di lembaga pemerintah sebanyak 30.355 atau 3,67 %. Untuk mengantisipasi terjadinya ketidaksetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan dan anak maka sangat diperlukan adanya dukungan dari organisasi-organisasi

perempuan yang ikut berperan aktif. Tugas pemerintah dalam hal ini memberikan pembinaan kepada organisasi perempuan. Pada tahun 2014 persentase pembinaan organisasi perempuan adalah sebesar 62,64% dari target sebesar 62,64%.

Beberapa upaya yang dilakukan Pemda DIY terkait pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan anak, antara lain menyusun kebijakan afirmatif dalam rangka pembangunan berprespektif gender, advokasi dan sosialisasi dalam rangka peningkatan peran perempuan dalam semua aspek kehidupan, memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak melalui regulasi dan fasilitasi korban.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperoleh *Anugerah Parahita Ekapraya* (APE) karena dinilai telah berkomitmen dan mengimplementasikan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), pencapaian dan inovasi dalam perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta upaya untuk memenuhi hak anak. Sejak tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014, pencapaiannya selalu meningkat. Diawali pada tahun 2009, DIY mendapatkan penghargaan APE Tingkat Pratama. Tahun 2010–2011, mendapatkan penghargaan APE Tingkat Madya dan tahun 2013–2014 mendapatkan penghargaan APE Tingkat Utama.

C.6. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Keberdayaan masyarakat salah satunya dapat dilihat dari persentase cakupan pembinaan organisasi masyarakat yaitu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) capaian jumlah PKK aktif yang dicapai di 5 kabupaten/kota tahun 2014, tercapai 100%.

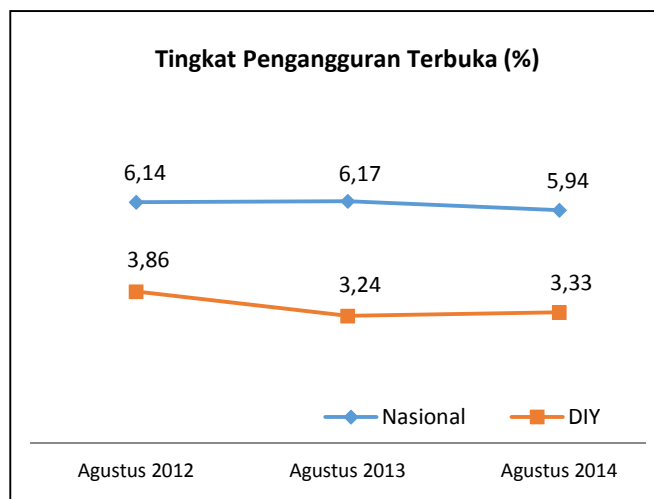
Pembangunan keberdayaan juga dapat dilihat dari tingkat partisipasi dan keswadayaan masyarakat. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPMMD), Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD), Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), dan Teknologi Tepat Guna (TTG) menunjukkan capaian sebesar 74,72% dari target awal sebesar 34%. Besarnya capaian ini karena masih tingginya rasa kegotongroyongan yang ada di dalam masyarakat.

Usaha Ekonomi Desa merupakan pilar ekonomi desa yang menyokong pembangunan pemberdayaan masyarakat, usaha ekonomi desa berupa Pasar Desa (PSD), Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD), Badan Kredit Desa (BKD) dan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP). Persentase Usaha Ekonomi Desa pada tahun 2014 mempunyai target sebesar 33,08 dengan capaian sebesar 46,53. Persentase profil desa sesuai standar pada tahun 2014 mempunyai target sebesar 55% dengan capaian sebesar 66,44%. Besarnya capaian ini karena adanya percepatan

penyelesaian profil desa dalam rangka implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

C.7 Urusan Ketenagakerjaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY pada Agustus 2014 sebesar 3,33%, jauh dibawah rata-rata nasional 5,94%. Jumlah penganggur terbuka sebanyak 67.418 orang didominasi oleh penganggur dengan tingkat pendidikan SMTA sebanyak 38.577 orang (57,22%), Diploma dan Sarjana sebanyak 14.336 orang (21,14%).



Capaian kinerja DIY melalui

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melakukan berbagai program dan kegiatan guna mengurangi tingkat pengangguran. Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat sebesar 26,66% dari target 24,2% atau dengan capaian 110,17%, naik 7,37% dibandingkan capaian 2013 sebesar 19,29%. Besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja sebesar 10,51% dari target 9% atau dengan capaian 116,78%, naik 4,55% dibandingkan capaian 2013 sebesar 5,96%. Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan sebesar 60,78% dari target 60% atau dengan capaian 101,30%, naik 12,71% dibandingkan capaian 2013 sebesar 48,07%. Persentase tenaga kerja terlatih yang mandiri dalam berwirausaha sebesar 40,08% dari target 40% atau dengan capaian 100,20% naik sebesar 11,5% dibandingkan capaian 2013 sebesar 28,58%.

Capaian kinerja kabupaten/kota ditunjukkan dengan prosentase pelayanan kepersertaan jaminan sosial bagi pekerja/buruh. Nilai capaian tahun 2012 sebesar 47,17 % dari jumlah peserta yang mengikuti kepersertaan jaminan sosial sebesar 79.814 orang dari total pekerja 150.934 orang. Tahun 2014 menunjukkan penurunan yakni 45,63 % dari jumlah pekerja 178.529 sedangkan yang peserta jaminan 87.389. Sementara tahun 2013 sebesar 47,57 % dari 87.389 peserta dengan total pekerja 160.626 orang.

Tabel 10 Prosentase pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja/buruh

Prosentase Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh	2012	2013	2014
Kab. Kulonprogo	41,65%	41,97%	43,13%
Kab. Bantul	61,09%	61,09%	60,06%
Kab. Gunungkidul	30,59%	28,67%	15,59%
Kab. Sleman	58,10%	61,82%	60,16%
Kota Yogyakarta	44,41%	44,36%	49,21%
Daerah Istimewa Yogyakarta	47,17%	47,58%	45,63%

D. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

D.1. Urusan Koperasi dan UKM

Kinerja Urusan koperasi dan UKM ditunjukkan dengan jumlah koperasi aktif di DIY mencapai rasio 85,98% dari total koperasi di DIY pada tahun 2014. Pada tahun 2013 total jumlah keseluruhan koperasi di DIY ada sejumlah 2.729 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 2.176, koperasi pasif sebanyak 499 koperasi dan koperasi beku sebanyak 58 koperasi. Sementara itu, dilihat dari volume usaha, terlihat adanya pertumbuhan volume usaha dalam kurun lima tahun terakhir. Pada tahun 2013 pertumbuhan volume usaha seluruh koperasi di DIY sebesar 0,7% dari 2,3 milyar menjadi 2,32 milyar.

Sementara itu, perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di DIY dalam kurun waktu 5 tahun terakhir juga menunjukkan peningkatan. Jumlah unit usaha UKM tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 0,6%, dari tahun 2012 sebanyak 203.995 menjadi 205.210 pada tahun 2013. UKM di DIY masih didominasi oleh sektor usaha di bidang perdagangan dan industri pertanian.

D.2. Urusan Pariwisata

Pada tahun 2013 jumlah pengunjung destinasi wisata di kabupaten/kota meningkat 8,09% dibandingkan tahun 2012. Pada tahun 2012 jumlah pengunjung daya tarik wisata (DTW) sebesar 9.407.955 orang, dan pada tahun 2013 berhasil mencapai 10.236.397 orang pengunjung. Sedangkan capaian (DTW) pada tahun 2014 sebesar 11.472.851. Hal ini menunjukkan DTW di wilayah DIY terus dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya. Pertumbuhan pariwisata DIY juga didorong peningkatan

penyelenggaraan *Meetings Incentives Conferencing Exhibitions (MICE)*. Tercatat pada tahun 2013 terdapat penyelenggaraan 13.695 MICE di hotel berbintang DIY. Jumlah ini meningkat 6,13% dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah ketersediaan infrastruktur hotel dan ruang pertemuan lainnya yang semakin meningkat dari sisi kuantitas dan kualitasnya.

D.3. Urusan Penanaman Modal

Tahun 2014, melalui Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu (GP2T) DIY telah memberikan pelayanan permohonan perizinan dan nonperizinan sebanyak 371 layanan izin prinsip dan 151 layanan non izin. Sehingga, target dalam RPJMD untuk tahun 2014 dapat tercapai.

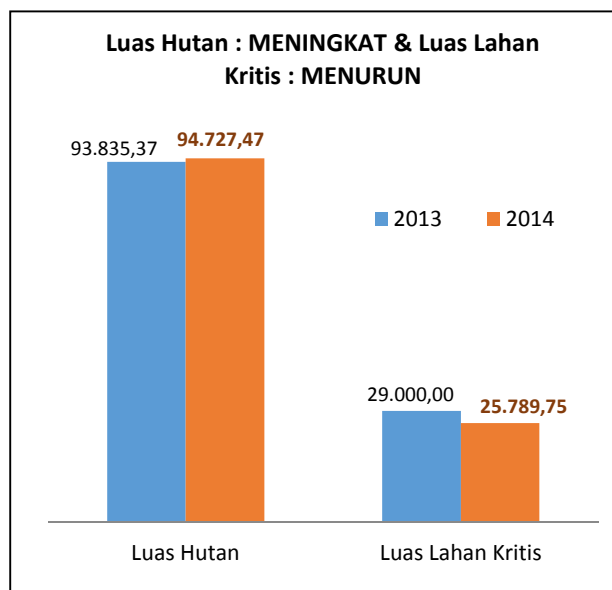
Tabel 11 Pertumbuhan Investasi di DIY

No.	Uraian	2013	2014	%
1	Penanaman Modal Dalam Negeri	2.864.654.491.755	3.568.546.291.755	24,57
2	Penanaman Modal Asing	5.203.115.642.883	5.955.853.842.883	14,46
	Jumlah	8.067.770.134.638	9.524.400.134.638	18,05

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi di DIY tahun 2014 naik sebesar 18,05 % dari tahun 2013. Perusahaan yang merealisasikan investasi di DIY sejumlah 218 perusahaan. Terdiri dari 119 PMA dan 106 PMDN dengan serapan tenaga kerja sebanyak 44.145 TKI dan 189 TKA. Pada tahun 2014, lima sektor terbesar penyumbang investasi di DIY secara berturut-turut dari yang terbesar, yaitu Perhotelan dan Restoran, Perdagangan, Industri Tekstil, Jasa lainnya dan Transportasi.

D.4. Urusan Kehutanan

Luas hutan di DIY pada tahun 2014 adalah sebesar 94.727,47 ha atau sebesar 29,78% dari luas DIY (3.185,18 km²). Capaian peningkatan produksi hasil hutan juga selaras dengan peningkatan persentase luas hutan. Peningkatan luas hutan di DIY tahun 2014 disebabkan oleh bertambahnya luasan hutan rakyat sejumlah 1.036,14 ha atau setara 1,38% pada tahun 2013. Peningkatan luas hutan rakyat tersebut juga memberikan implikasi adanya penurunan luas lahan kritis. Tahun 2014 luas



lahan kritis di DIY adalah 25.789,75 ha atau turun setara 5,5% dibandingkan dengan tahun 2013. Hal ini menunjukkan capaian positif, karena luas lahan kritis DIY dibawah angka luasan ambang batas keluasaan, yaitu 27.000 ha.

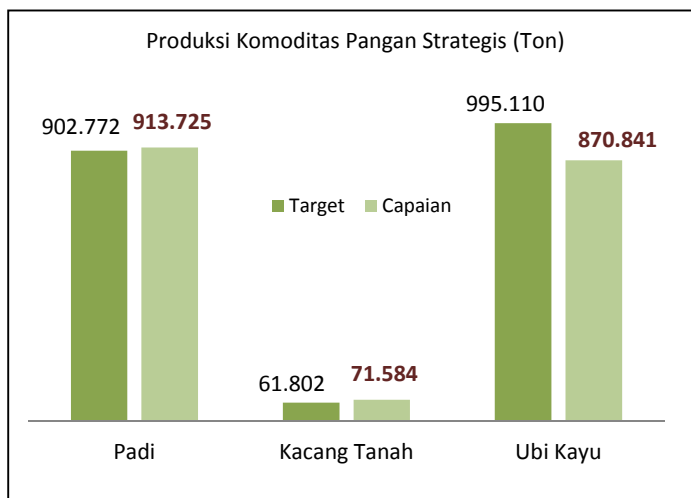
Gangguan kerusakan hutan, antara lain berupa kebakaran, pencurian, dan bencana alam. Data kerusakan hutan tahun 2014 sebesar 8,56% dan data tahun 2013 sebesar 9,97% (mengalami penurunan sebesar 1,41%). Hal tersebut didukung oleh peningkatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat, serta peningkatan pengamanan hutan.

D.5. Urusan Kelautan dan Perikanan

Laju perkembangan produksi perikanan budidaya melebihi perikanan tangkap. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata pertumbuhan produksi perikanan budidaya tahun 2009 hingga tahun 2014 yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan, yaitu sebesar 29,5%. Pertumbuhan positif juga dapat dilihat dari laju peningkatan ketersediaan ikan perkapita dari tahun ke tahun. Ketersediaan ikan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,79% dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Pada tahun 2014, ketersediaan ikan mencapai nilai 27,54 kg/kapita/tahun atau mengalami peningkatan sebesar 1,74 kg/kapita/tahun dibandingkan pada tahun 2013, mengalami kenaikan sebesar 6,7%.

D.6. Urusan Pertanian

PDRB DIY tahun 2013 menunjukkan kontribusi sektor pertanian menempati posisi ketiga (15,18%), setelah sektor jasa-jasa (17,58 %) dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (21,28 %). Dominasi sektor pertanian di DIY juga tampak pada aspek kewilayahan. Dilihat dari aspek kewilayahan, sektor pertanian masih dominan dengan luas lahan pertanian mencapai 75% (240.242 ha) dari luas wilayah DIY. Sebagian besar merupakan lahan kering yang terletak di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul serta basis pertanian lahan basah atau sawah produktif berada di wilayah Kabupaten Sleman dan Bantul.

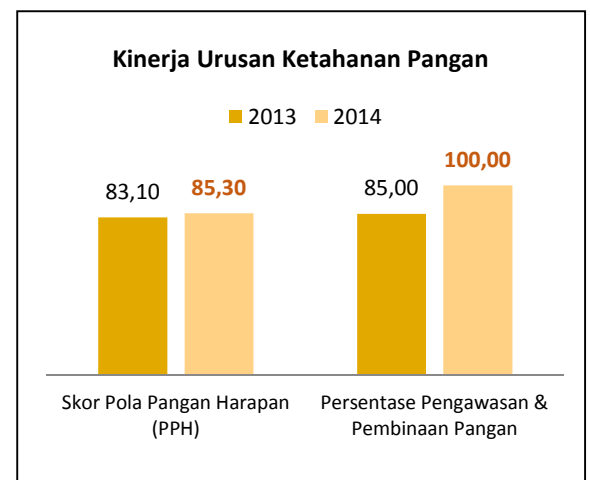


Indikator jumlah produksi tanaman pangan tahun 2014 sebesar 2.193.605 ton, berada di bawah target sebesar 2.321.800 ton (94,48%). Walaupun demikian, produksi komoditas strategis padi sebesar 913.725 ton GKG melampaui target (902.772

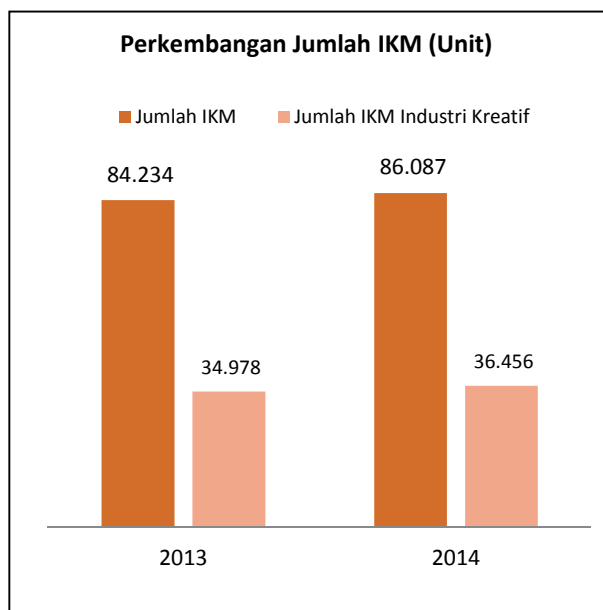
ton), begitu juga kacang tanah sebesar 71.584 ton biji kering dari target 61.802 ton. Namun penurunan cukup nyata terjadi pada ubi kayu, tercapai 870.841 ton dari target 995.110 ton.

D.7. Urusan Ketahanan Pangan.

Urusan ketahanan pangan, tingkat dan kualitas konsumsi pangan tercermin dari skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH pada tahun 2013 adalah 83,1 meningkat menjadi 85,3 di tahun 2014. Dari sisi keamanan pangan, pada tahun 2013 di DIY persentase pengawasan dan pembinaan pangan sebesar 85% mengalami kenaikan pada tahun 2014 menjadi sebesar 100%.



D.8. Urusan Industri



Jumlah IKM meningkat dari 84.234 unit pada tahun 2013 menjadi 86.087 unit pada tahun 2014 atau naik 2,20%. Demikian juga dengan jumlah IKM Industri Kreatif yang meningkat sebesar 4,22% dari tahun sebelumnya sehingga pada tahun 2014 menjadi 36.456 unit usaha. Sementara itu, jika dilihat dari aspek nilai produksi, terdapat peningkatan nilai produksi IKM sebesar 3,20% dari

Rp3.294.485.000,00 menjadi Rp3.399.909.000,00 pada tahun 2014.

D.9. Urusan Perdagangan

Capaian kinerja pembangunan urusan tersebut ditetapkan dengan indikator jumlah SIUP; jumlah UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang Ditera dan Ditera Ulang; dan Nilai Ekspor. Jumlah SIUP dan Jumlah UTTP yang Ditera dan Ditera Ulang mencerminkan kinerja sisi perdagangan dalam negeri. Jumlah SIUP meningkat sebesar 5,69% dari 43.818 pada tahun 2013 menjadi 46.315 perusahaan terdaftar pada tahun 2014. Kinerja nilai ekspor mencerminkan sisi perdagangan luar negeri yang pada tahun 2014 mencapai nilai US \$233,25 juta atau meningkat sebesar 10,15% dari tahun 2013. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan usaha perdagangan di DIY.

Tabel 13. Perkembangan Ekspor DIY Tahun 2012-2014

Uraian	2012	2013	2014
Volume (Juta kg)	33,54	34,03	57,51
Nilai (Juta US \$)	177,07	211,76	233,25
Komoditi	108	127	166
Negara	98	111	114

Uraian	2012	2013	2014
Eksportir	235	286	310

Kinerja perdagangan luar negeri menunjukkan perkembangan yang positif dalam kurun lima tahun terakhir. Tercatat nilai ekspor DIY senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, nilai ekspor DIY mencapai nilai US \$233,25 juta dengan negara tujuan ekspor sebanyak 114 negara. Sepuluh komoditas ekspor unggulan DIY adalah pakaian jadi, mebel kayu, sarung tangan kulit, kerajinan kayu, STK Sintetis, atsiri daun cengkeh, kulit disamak, kerajinan batu, kerajinan kulit, produk tekstil lainnya.

E. Pembangunan Infrastruktur

E.1. Urusan Perhubungan

Dalam penataan sistem transportasi difokuskan pada pengurangan kemacetan di perkotaan melalui manajemen penataan dan rekayasa lalu lintas guna mencapai *load factor* angkutan perkotaan dari 32,57% menjadi 42,57% dan peningkatan akses di pedesaan. Untuk mencapai target indikator ini, dilaksanakan kegiatan pengembangan dan pembangunan fasilitas *transferpoint* dan *park and ride* pada Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan. Pada tahun 2014, capaian indikator untuk tolak ukur kinerja ini sebesar 40% dari 30,42% yang ditargetkan.

D.2. Urusan ESDM

Terkait dengan komoditas tambang, sampai dengan tahun 2013, telah dicapai peningkatan nilai tambah melalui fasilitasi pengolahan komoditas tambang batuan sebesar 9% (10 lokasi dari total 22 lokasi kegiatan pertambangan yang potensial dikembangkan). Target peningkatan nilai tambah di tahun 2014 sebesar 10% (11 lokasi) dengan realisasi sebesar 11% (12 lokasi). Capaian realisasi peningkatan kinerja pengelolaan usaha pertambangan dilakukan melalui pemberian bantuan alat pengolah batu sebanyak 2 (dua) lokasi yaitu di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman.

Dalam rangka penertiban area pertambangan tanpa ijin, pada tahun 2012 telah dilakukan penertiban area pertambangan liar seluas 7.000 Ha dari keseluruhan area pertambangan liar seluas 120.382 Ha atau 5,81 %. Sementara untuk tahun 2013 dapat menerbitkan seluas 5.000 Ha dari total luas tambang liar 113.382 Ha atau 4,41 %. Pada

tahun 2014 sebesar 2,77 % dari luas tambang liar 108.382 Ha , luas penambangan liar 3.000 Ha.

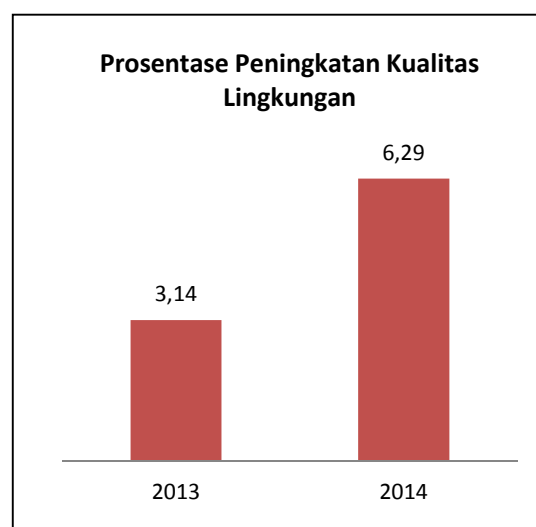
D.3. Urusan Pekerjaan Umum

Pada tahun 2013, panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (kondisi baik dan sedang) telah mencapai 451,30 km atau 72,87%. Berdasarkan hasil inspeksi jalan dan jembatan terhadap seluruh ruas jalan dan jembatan (100%), pada akhir tahun 2014 diketahui jalan dalam kondisi mantap sepanjang 456,43 km atau 73,70%. Kondisi jalan mantap tersebut telah melampaui target yang dicapai melalui program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan serta program peningkatan jalan dan jembatan.

Dalam bidang ini, Pemda DIY meraih berbagai penghargaan tingkat nasional, salah satunya sebagai Juara I Lomba Pekerja Konstruksi Bidang Mandor Pelaksanaan Pekerjaan Jalan. Pada Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2014, Pemerintah Daerah DIY telah berhasil meraih prestasi di tingkat nasional yaitu Peringkat Terbaik Kesatu Kategori Provinsi Sub Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi dan Peringkat Terbaik Ketiga Kategori Provinsi Sub Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

D.4. Urusan Lingkungan Hidup

Angka persentase peningkatan kualitas lingkungan pada tahun 2014 dihitung berdasarkan peningkatan kumulatif dari data kualitas air sungai (parameter kunci COD dan BOD) dan kualitas udara ambien (parameter kunci CO dan HC). Kualitas air sungai dianalisis dari hasil uji pada 11 sungai di DIY, sedangkan kualitas udara ambien berdasarkan hasil uji lokasi tepi jalan protokol (*roadside*), kawasan permukiman, dan sekitar kawasan industri. persentase peningkatan kualitas lingkungan target akumulatifnya pada tahun 2014 adalah 6,29% dan realisasinya sebesar 6,29% (memenuhi target). Pada tahun 2013, target peningkatan kualitas lingkungan sebesar 3,14 dapat terpenuhi.



D.5. Urusan Komunikasi dan Informatika

Pemerintah Daerah DIY melalui Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2006, telah menetapkan *Blueprint Jogja Cyber Province* yang dititikberatkan pada program *Digital Government Services (DGS)* sebagai panduan strategis implementasi dan pengembangan e-government di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Dalam dokumen DGS yang telah diperbaharui, pada tahun 2013 direncanakan ada 10 program yang menjadi unggulan dalam pelaksanaan DGS dan telah tercapai. Seluruh program layanan sudah dikembangkan dengan pelayanan secara on-line. Beberapa program pendukung pelaksanaan DGS di Pemerintah Daerah DIY untuk pelayanan masyarakat dan pelayanan internal pemerintahan antara lain



Portal Pemda DIY jogjaprov.go.id, LPSE (Pengadaan Barang Secara Elektronik), CPNS On-line (Penerimaan CPNS Secara Online), SIPKD (Sistem Informasi Penganggaran Keuangan Daerah), Web Monev, Jogja Plan, SIM Pegawai, SIM Perijinan Terpadu Pemda DIY, Sistem Informasi Jembatan Timbang, Sistem Informasi Perijinan online, dan sebagainya. Dengan konsep *e-government* tersebut, masyarakat dapat ikut terlibat dan berperan aktif dalam mendukung dan memberikan partisipasi dalam kegiatan pembangunan. Selain itu, informasi dan layanan kepada masyarakat dapat lebih mudah diakses dan digunakan. Konsep inilah yang dinamakan layanan teknologi berbasis *Citizen Centris*.

D. Sosial, Budaya dan Olah Raga

D.1 Urusan Sosial

Sasaran utama penanganan permasalahan sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Kesulitan, hambatan atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan sosial, keterbelakangan atau kondisi perubahan lingkungan yang kurang mendukung.

Dalam penanganan permasalahan sosial, pemerintah daerah tidak hanya menangani langsung terhadap penyandang masalahnya tetapi juga mendorong tumbuh berkembangnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Target 2014 yang ditetapkan untuk persentase PSKS dalam kegiatan usaha adalah sebesar 66,40% dan realisasinya sebesar 78,48%. Capaian tersebut melebihi target karena terdapat kegiatan perekrutan PSKS baik melalui APBD maupun APBN yang menambah jumlah PSKS yang ada.

Pemerintah Daerah telah melaksanakan serangkaian program dan kegiatan untuk menangani PMKS dan mendorong PSKS di wilayah DIY. Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sosial DIY beserta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/panti-panti sosial yang berada di bawahnya.

D.2. Urusan Kebudayaan

Implementasi Hasil Kesepakatan (*Sister City-Sister Kingdom*) terlaksana dalam rangka menjalin kemitraan dan diplomasi budaya. Pada tahun 2014 target telah terlaksana 171%. Dari target kinerja tujuh implementasi, terealisasi sebanyak lima belas implementasi, antara lain: pembangunan dan peresmian rumah joglo di Slovenia, pemberian seperangkat gamelan yang diberi nama "Jali Roso" untuk *National Concert Hall* Dublin, misi kebudayaan ke *Denizli International Festival* di Turki, dan misi-misi kebudayaan di beberapa negara lain yang sudah memiliki perjanjian kerjasama antara lain Canberra, Suriname, Nanning (China), dan Tokyo. Indikator Persentase ruang seni dan budaya yang representatif merupakan salah satu indikator yang penting bagi Pemda DIY. DIY adalah wilayah yang dikenal sebagai pusat budaya, oleh karena itu ketersediaan ruang seni budaya yang representatif mutlak dibutuhkan. Sebagai kota budaya dan pariwisata pada tahun 2014 terselenggara 433 event festival seni dan budaya, sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 410 dan 2012 sebanyak 321 event.

D.3. Urusan Kearsipan

Kinerja urusan ini dilaksanakan melalui tiga program, yaitu Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, dan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi. Pencapaian target indikator optimalisasi pengelolaan arsip SOPD DIY sebesar 20 SOPD dari target 15 SOPD atau 133,33%. Pencapaian target indikator persentase bertambahnya khasanah arsip sebagai warisan budaya sebesar 41,19% dari target 9,00% atau 457,66%. Sementara itu, pencapaian target indikator persentase

bertambahnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi sebesar 19,42% dari target 15,00% atau 129,46%.

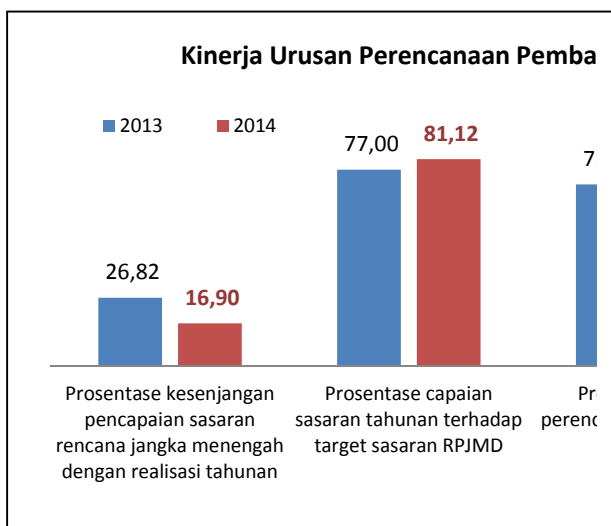
D.5 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Di bidang olahraga, prestasi yang telah diraih pada tahun 2014 cukup membanggakan karena medali yang diperoleh dalam lomba olahraga tingkat nasional adalah sejumlah 62 medali, jauh lebih tinggi dari capaian tahun 2013 yaitu sejumlah 33 medali dan melampaui target tahun 2014, yaitu sejumlah 23 medali. Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan atau pembinaan di bidang olahraga pada tahun 2014 juga telah memenuhi target yaitu sejumlah 2.100 orang sehingga terjadi peningkatan dibanding tahun 2013 yang baru mencakup 2.000 orang. Ketersediaan gelanggang oralah raga dan lapangan olah raga masih minim, padahal potensi keolahragaan di DIY cukup tinggi.

E. Perencanaan Pembangunan, Statistik dan Pengelolaan Keuangan Daerah

E.1. Perencanaan Pembangunan

Dalam urusan pemerintahan perencanaan pembangunan terdapat empat sasaran dan indikator sasaran, meliputi : Pertama, keterpaduan program/kegiatan pembangunan meningkat dengan indikator sasaran persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan. Realisasinya menunjukkan persentase kesenjangan yang menurun mencapai angka 16,90%. Hal ini melebihi target penurunan kesenjangan sebesar 20,45%. Ketercapaian ini menunjukkan upaya perencanaan yang dilakukan dengan koordinasi lintas sektoral maupun kewenangan dalam mendukung capaian sasaran yang sudah ditentukan,



sudah berjalan efektif. Meski begitu, diperlukan upaya lebih baik lagi dalam desain perencanaan untuk merunkan kesenjangan capaian sasaran.

Kedua, integrasi program pembangunan sektoral dan kewilayahan meningkat dengan indikator sasaran persentase kesenjangan pencapaian sasaran

rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan, perkonomian, kesejahteraan rakyat dan sarana prasarana. Pada tahun 2014, bisa ditunjukkan bahwa ada penurunan persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan sarana prasarana sebesar 3,55% dari target yang ditetapkan.

Ketiga, konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya dengan indikator sasaran Persentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap Target Sasaran RPJMD. Realisasi capaian indikator kinerja sasaran ke-3 pada tahun 2014 telah melebihi target sebesar 2,52%, dari target sebesar 79% mampu direalisasikan sebesar 81,12%. Pada akhir RPJMD tahun 2017 diharapkan target 100% dapat dicapai karena pada tahun 2014 ini telah disumbang pencapaian sebesar 81,12%.

Terakhir keempat, meningkatkan aksesibilitas terhadap data dengan indikator sasaran Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses. Realisasi capaian indikator ini pada tahun 2014 melebihi target sebesar 6,38%. Target realisasi capaian yang ditetapkan pada tahun 2014 sebesar 70% sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 76,38%. Pengembangan Sistem Pengelolaan Data layanan data kepada masyarakat berupa Sistem Informasi Dataku, Website Bappeda, dan pengelolaan data spasial mempermudah pengelolaan data baik yang bersifat tabular maupun spasial.

E.2 Statistik

Urusan statistik menjalankan program pengembangan statistik daerah yang terdiri dari dua kegiatan. Kegiatan pertama yaitu Pengolahan, analisis, monitoring dan evaluasi data statistik daerah yang memproduksi: buku analisis PDRB DIY dan ICOR DIY tahun 2009-2013, buku analisis makro ekonomi DIY, buku analisis kesejahteraan sosial DIY, IPM per kecamatan se-DIY, dan *up date database* rumah tangga sasaran. Analisis tersebut digunakan sebagai input yang menyajikan kondisi perekonomian yang sudah, sedang, dan akan berlangsung. Penyediaan data tersebut merupakan bagian upaya Pemerintah Daerah dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan di DIY.

Kegiatan kedua yaitu Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah yang menghasilkan produk berupa data perencanaan, profil daerah, DIY dalam Angka (DDA), dan visualisasi data perencanaan pembangunan. Penyediaan data pembangunan lintas sektor/ wilayah di DIY dalam bentuk numerik disajikan dalam DDA

dan data perencanaan. DDA merupakan kumpulan data sektoral yang disusun dari hasil kerjasama dengan BPS sedangkan Data Perencanaan merupakan kumpulan data SIPD DIY dan data Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

E.3 Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, Pemda DIY telah memperoleh opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2010, yang kemudian secara beruntun sampai pada tahun anggaran 2013 DIY dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

Tabel 15 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemda DIY, Tahun 2012-2014

No.	Tahun	Opini BPK	Keterangan
1.	2012	WTP	Tanpa paragraf penjelas
2.	2013	WTP	
3.	2014	WTP	

F. Pemerintahan Dan Ketertiban Umum

F.1. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.

Capaian program dan kegiatan dalam mendukung urusan ini pada tahun 2014 secara umum dapat berjalan baik dengan output 100%. Hal tersebut dapat tercapai karena adanya perbaikan kualitas data kependudukan dari tahun 2013. Pada tahun 2013, diadakan pembersihan data ganda yang dilakukan secara terus-menerus dan kegiatan pemutakhiran *database* kependudukan di Pemerintah Daerah DIY. Terobosan lain dalam hal kepemilikan dokumen kependudukan, dilakukan melalui fasilitasi kepemilikan akta kelahiran dan perkawinan bagi warga miskin.

Dibandingkan dengan tahun 2013, kualitas data kependudukan pada tahun 2014 telah jauh lebih baik. Salah satu indikatornya, jumlah penduduk di DIY berdasarkan data SIAK lebih banyak sekitar 150 ribu jiwa dibandingkan dengan DKP (data hasil konsolidasi dan pembersihan Kemendagri) , sedangkan pada tahun 2013 selisihnya mencapai 250 ribu.

F.2. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Dalam rangka meningkatkan kerukunan masyarakat dan menjalin komunikasi antar elemen masyarakat di DIY, dilaksanakan berbagai upaya strategis, antara lain

fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Dialog antar Umat Beragama/Forum Umat Beriman, serta Dialog Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Pemda DIY juga melakukan program pendidikan politik masyarakat, yang meliputi kegiatan-kegiatan seperti Forum Kemitraan Rapat Kerja Antara Ormas/Orpol dan pemerintah di daerah. Pembinaan dan Optimalisasi Fungsi dan Peran Ormas dan LSM, Diskusi Politik dalam Pengembangan Pendidikan politik Perempuan, serta sosialisasi Pemilu 2014. Berdasarkan indikator capaian kinerja, persentase penurunan konflik sebesar 100,90 persen. Sementara itu, kasus ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat capaiannya sebesar 100 persen.

F.3. Urusan Otonomi Daerah

Batas daerah harus memenuhi aspek yuridis melalui penetapan dalam Permendagri tentang Batas Daerah, serta aspek teknis berupa teridentifikasinya koordinat posisi pilar batas di lapangan. Dalam konteks DIY, terdapat 8 segmen wilayah perbatasan yang melibatkan DIY, meliputi 1 segmen batas antar provinsi, dan 7 segmen batas antar kabupaten-kota di DIY. Dari kedelapan segmen tersebut, semuanya telah ditetapkan dalam Permendagri tentang Batas Daerah secara definitif, terakhir batas daerah antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman yang ditetapkan melalui Permendagri Nomor 83 Tahun 2013. Kedelapan Permendagri tentang Batas Daerah tersebut memberikan area/wilayah spasial yang pasti (*fixed boundary*) bagi kabupaten/kota serta provinsi di DIY sebagai daerah otonom, sebagai dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Tabel 16 Segmen Perbatasan di DIY

No.	Segmen Perbatasan	Permendagri tentang Batas Daerah
1.	DIY – Provinsi Jawa Tengah	Permendagri No. 19 Tahun 2006
2.	Kabupaten Kulonprogo – Kabupaten Bantul	Permendagri No. 70 Tahun 2007
3.	Kabupaten Gunungkidul – Kabupaten Bantul	Permendagri No. 71 Tahun 2007
4.	Kabupaten Sleman – Kota Yogyakarta	Permendagri No. 72 Tahun 2007
5.	Kabupaten Gunungkidul – Kabupaten Sleman	Permendagri No. 4 Tahun 2009
6.	Kabupaten Kulonprogo – Kabupaten Sleman	Permendagri No. 61 Tahun 2009
7.	Kota Yogyakarta – Kabupaten Bantul	Permendagri No. 15 Tahun 2012
8.	Kabupaten Bantul – Kabupaten Sleman	Permendagri No. 83 Tahun 2013

